

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DAN
GENANGAN AIR DI KOTA MALANG
(Studi Pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang)**

Taufan Eka Pramudita¹, Yaqub Cikusin², Hirshi Anadza³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jalan MT Haryono No. 193, Malang, 65144, Indonesia

Email : taufan.eka98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Dilakukan Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Di Kota Malang. Pada Dinas PUPRPKP Kota Malang Di Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan Uraian 1) Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Pada Dinas PUPRPKP Kota Malang 2) Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas PUPRPKP Kota Malang Dalam Menjalankan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air ?. Penelitian Ini Dilaksanakan Pada Musim Penghujan Dan Banjir Sehingga Penelitian Mengutamakan Keselamatan Peneliti Dan Informan. Sementara itu, peneliti ini dilihat dari terori kebijakan publik George C. Edward III yang mengemukakan model implementasi kebijakan yang bersandar pada empat variabel, yaitu 1) Komunikasi 2) Sumber daya 3) Disposisi 4) Struktur birokrasi. Untuk mengetahui penerapan kebijakan Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam penanggulangan banjir dan genangan air yang disebabkan oleh saluran drainase. Hasil penelitian dalam penulisan ini, Dinas PUPRPKP menjalankan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Pelaksana dari program pembangunan drainase sendiri dilakukan oleh Dinas PUPRPKP seksi drainase kota Malang. Dinas PUPRPKP dalam menjalankan Implementasi Kebijakanannya yaitu : pertama, Komunikasi, dalam hal ini Dinas PUPRPKP tidak bisa hanya melibatkan instansi Dinas PUPRPKP saja akan tetapi juga melibatkan instansi lainnya Kedua, Sumberdaya, Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan adanya dukungan dari Sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. 1) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam sumber daya manusia Dinas PUPRPKP dalam menjalankan implemtasi kebijakan belum bisa di katakan berhasil karena faktor kekurangan SDM, 2) Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Keuangan atau bisa disebut anggaran adalah salah hal yang dibutuhkan dalam sarana dan perasana dalam peningkatan, pemeliharaan, pembangunan saluran drainase melalui APBD. Ketiga, Disposisi dalam proses implementasi karakter pelaksana sangat mendukung berjalannya implementasi seperti komitmen, demokratis, dan kejujuran. Keempat. Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam melaksanakan program penanggulangan banjir dan genangan karena saluran drainase dilaksanakan oleh Bidang tata kelola air dan drainase perkotaan serta UPT.

Kata Kunci : Kebijakan, Banjir, Drainase

Pendahuluan

Indonesia merupakan wilayah yang dinyatakan rawan terhadap bencana alam. Bencana alam adalah fenomena alam yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan menghancurkan lingkungan yang akhirnya timbullah korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan bangun yang telah dibangun. Bencana alam terjadi karena eksploitasi sumber daya alam tanah, hutan, dan air yang berlebihan serta adanya perubahan cuaca atau iklim global, sehingga dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan serta meningkatnya laju erosi dan sedimentasi. Salah satu fenomena alam yang

menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam saat turunnya curah hujan beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir.

Banjir bisa dikatakan adalah fenomena alam biasa, namun banjir dapat menjadi hal yang merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia. Banjir dan genangan air memiliki perbedaan yaitu memiliki perbedaan pada ketinggian permukaan air, secara normal genangan air hanya memiliki tinggi kurang dari 40 cm kecuali jika ada hal-hal yang mempengaruhinya dan banjir memiliki ketinggian lebih dari 40 cm. Bencana banjir dipengaruhi oleh faktor alam salahsatunya yaitu curah hujan di atas normal,

selain curah hujan tinggi yang dapat mengakibatkan adanya banjir faktor ulah manusia juga dapat mengakibatkan banjir.

Kota Malang merupakan salah satu Kota terbesar di Jawa Timur yang sering dilanda banjir dan banyaknya genangan air. Penanganan banjir dan genangan air di kota Malang dilakukan oleh beberapa instansi, salah satunya adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam kaitannya dengan penanggulangan banjir dan genangan air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam penataan, merencanakan, dan membangun infrastruktur yang nantinya berfungsi mengatasi banjir dan genangan air. Masalah banjir dan genangan air di kota Malang sering terjadi pada musim hujan meskipun kota Malang berada di daratan tinggi tidak hanya curah hujan yang tinggi dan diakibatkan oleh resapan air yang berkurang karena alih fungsi lahan besar-besaran dalam jelang waktu 15 tahun terakhir di kota Malang Banjir dan genangan air yang melanda kota Malang dalam 4 tahun terakhir menjadi masalah warga kota Malang, karena musim hujan yang sebelumnya membuat kota Malang menjadi sejuk akan tetapi untuk saat ini justru menimbulkan kecemasan, musim hujan membuat kenyamanan warga kota Malang menjadi terganggu akibat munculnya ancaman banjir dan genangan air di kota Malang dan dampak hujan deras datang menguyur kota Malang yang mengakibatkan banjir dan genangan air membuat beberapa ruas jalan menjadi macet total.

Kota Malang mengalami kenaikan meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 29 titik banjir dan genangan air yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, hal ini yang sebelumnya berjumlah 59 titik yang besumber dari curah hujan tinggi akan tetapi lebih mendominasi karena sampah yang terbuang sembarangan. Pada Tahun 2020 jumlah banjir di kota Malang berjumlah 25 titik banjir hal ini disebabkan oleh sumbatan sampah dan tersumbatnya Drainase. Dari penurunan tersebut pada 2021 titik banjir dan genangan air di kota Malang bertambah 11 lokasi salahsatu sumber banjir dan genangan air karena faktor tersumbatnya drainase dan curah hujan tinggi, jadi pada tahun 2021 jumlah banjir di kota Malang menjadi 31 titik banjir Banjir merupakan masalah serius yang harus di tangani oleh pemerintah.

Dengan bertambahnya titik banjir di kota Malang di awal tahun 2021 terdapat satu warga kota Malang yang yang di nyatakan hilang.

	Banjir	Tinggi Dominasi Sampah
2019	26 Titik Banjir	Curah Hujan
2020	25 Titik banjir	Sumbatan Sampah Sumbatan drainase
Januari 2021	Titik Banjir Bertambah 11 Lokasi	Curah Hujan Tinggi Sumbatan Drainase

Penyebab banjir dan genangan air di kota Malang terjadi karena adanya pembangunan yang dilakukan tidak berwawasan lingkungan dalam arti pembangunan tersebut berada pada bantaran sungai atau tepi sungai yang mengakibatkan luas sungai menjadi jadi sempit hal ini menjadikan volume air sungai pada saat curah hujan meluap. Resapan air yang ada masih belum mampu menyerap dengan baik dan kurangnya pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sehingga RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan tidak dapat difungsikan karena penuhnya lahan dengan permukiman. Kedua, terjadinya banjir dan genangan air diakibatkan pada pola hidup masyarakat yang buruk, di mana masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya yang mengakibatkan penyumbatan pada selokan ataupun resapan air yang sudah dibuat.

Dalam penanggulangan bencana adalah bagian internal dari pemerintah. Akantetapi bencana banjir hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat. Pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap tersenggaranya penanggulangan bencana dalam hal sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana seharusnya dan juga menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dalam standar pelayanan harus segera mungkin diupayakan. Dalam penanggulangan bencana harus berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi yang mencakup pemerintah kota, maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana upaya yang dalam penanggulangan banjir khususnya di pemerintahan kota Malang. Disisi lain pemerintah perlu adanya sosialisasi terkait bencana khususnya bencana banjir, hal ini bertujuan untuk mencegah, menyiapkan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana benar-benar terjadi sehingga dapat mengurangi risiko korban jiwa dan program pemerintah dalam menanggulangi banjir dan genangan air dapat berjalan dengan baik agar warga kota Malang tidak mencemaskan adanya banjir dan genangan air pada saat hujan tinggi datang

Tabel 01
Jumlah titik dan sumber banjir di kota Malang

Tahun	Jumlah Titik Banjir	Sumber Banjir
2018	59 Titik	Curah Hujan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air pada Dinas PUPRKP Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas PUPRKP Kota Malang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas PUPRKP Malang dalam penanggulangan banjir dan genangan air pada Dinas PUPRKP Kota Malang.
2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas PUPRKP Kota Malang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Sebagai Solusi

kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan tersendiri dalam konteks maupun dalam kontennya. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan.

Subarsono (2006) menjelaskan kerangka kerja kebijakan, yang dalam realitasnya ditentukan oleh beberapa aspek sebagai berikut. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya: finansial, material dan infrastruktur lainnya.

Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik pada tempat atau wilayah kebijakan tersebut diimplementasikan. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi implementasi akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

Implementasi Kebijakan Kebijakan, George C. Edward III

Implementasi kebijakan menjadi tahap paling penting dalam kebijakan, dan barangkali lebih rumit daripada perumusannya. Mengenai model implementasi kebijakan, George C. Edward III (dalam Sahya Anggara 2016:539) mengemukakan model implementasi kebijakan

yang bersandar pada empat variabel, yaitu 1)Komunikasi, yaitu merujuk pada bahwa setiap implementasi kebijakan yang akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Variabel ini cukup penting dengan anggapan semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan, maka akan semakin mengurangi tingkat penolakan atau kekeliruan dalam implementasi kebijakan. 2)Sumber daya, yaitu merujuk pada bahwa setiap implementasi kebijakan diharuskan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya waktu. Keandalan sumber daya manusia dapat memberi tingkat presisi yang tinggi dalam proses implementasi, tercukupinya sumber daya finansial dapat memengaruhi efektivitas keberlangsungan implementasi, sedangkan sumber daya waktu dapat memberi gambaran kapan proses implementasi sebaiknya diselesaikan. 3)Disposisi, yaitu merujuk pada karakteristik yang menempel pada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki pelaksana ialah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Tiga karakter tersebut penting untuk dimiliki sebab berpengaruh besar terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. 4)Struktur birokrasi, merujuk pada dua hal penting, yaitu mekanisme implementasi kebijakan dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya berupa standar operasi prosedur yang dicantumkan dalam petunjuk kebijakan, sedangkan struktur organisasi pelaksana sebaiknya mungkin menjauhkan diri dari sifat berbelit, panjang, dan kompleks untuk menghindari pengambilan keputusan secara cepat, lantaran bisa memengaruhi

Definisi Konseptual dan Operasional

Definis konseptual efektivitas dan kecepatan implementasi kebijakan merupakan sebuah definisi yang memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang ada menggunakan pemahaman sendiri dengan singkat, jelas, dan tegas. Dalam hal ini yang dimaksud konsep adalah berbagai terori/konsep yang telah dikutip sebelumnya dan menjadikan satu definisi khusus.

1. Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi dikawasan tersebut. Banjir adalah suatu bagian dari siklus *Hidrologi*, yaitu pada bagian air di bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus *hidrologi* yaitu bahwa volume air yang mengalir ke dalam tanah.

Alirana tanah = Curah Hujan - (Reresap ke dalam tanah + Penguapan ke udara)

untuk pengembangbiakan ikan (sedikit predasi dan banyak nutrisi).

2. Penanggulangan Banjir

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dalam UU ini pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan merasa aman, khusus bagi masyarakat yang rentan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan. Kebijakan penanggulangan bencana berperan serta dalam perencanaanm pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana

Definisi Operasional Penanggulangan Banjir

1. Penanggulangan Banjir

Berdasarkan operasional penanggulangan banjir, maka bencana banjir dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara teknik (engineering), dan cara non teknik (non-engineering). Cara teknik misalnya melalui pengelolaan daerah banjir dengan membuat bendungan, bendung/dam pengendali banjir, tanggul di sepanjang sungai, pengerukan dasar sungai, dan sebagainya, sedangkan cara non teknik adalah dengan membuat peraturan tata ruang agar pemanfaatan lahan yang tidak ramah lingkungan di daerah rawan banjir dan kawasan resapan air dapat dikendalikan, serta dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan banjir. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir harus melewati 3 (tiga) tahap utama, yaitu : (1) tahap sebelum terjadi bencana; (2) tahap selama terjadi bencana, dan (3) tahap setelah bencana.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, Pengamatan (observasi) dan Dokumentasi.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah Implementasi kebijakan Dalam Penanggulangan Banjir Dan Genangan Air Di Kota Malang, berfokus pada Seperti buku, jurnal dan internet berupa perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh data-data di lapangan. Dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Hasil Dan Pembahasan

Di Malang, musim hujan kerap diindikasikan menjadi musim banjir dan genangan air. Tidak hanya di kota yang termasuk daratan rendah saja namun juga di kota yang termasuk daratan tinggi, terutama di terjadi karena kondisi gorong-gorong dan saluran drainase. Permasalahan drainase di kota Malang bukanlah hal yang sederhana banyak faktor yang memengaruhi dan pertimbangan yang matang dalam perencanaan. Antara lain peningkatan debit, penyempitan dan pendangkalan saluran, amblesan tanah, limbah, sampah. Dan sumber permasalahannya juga terjadi peningkatan jumlah penduduk atau bangunan yang ada di kota Malang yang sangat cepat akibat dari pertumbuhan dan urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, seperti perumahan, air bersih, pendidikan dan lain-lain. Disamping itu peningkatan penduduk juga selalu diikuti peningkatan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat (sampah).

Secara umum bahwa dinas PUPRPKP hanya menanggulangi sebelum dan sesudah banjir dan genangan air bukan saat terjadinya banjir. Dalam Implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air. Dalam penyelenggaraan program pembangunan drainase sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan, dan memenuhi keandalan pelayanan, dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan.

Dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Dinas PUPRPKP dalam penanggulangan banjir yang diakibatkan sersumpalnya sistem drainase oleh sampah hal yang dilakukan Dinas PUPRPKP dalam menjalankan Implementasi Kebijakannya yaitu : *pertama*, Komunikasi, dalam hal ini Dinas PUPRPKP tidak bisa hanya melibatkan instansi Dinas PUPRPKP saja akan tetapi juga melibatkan instansi lainnya untuk memudahkan pemulihan kota Malang terhadap banjir dan genangan air tidak hanya melibatkan instansi saja Dinas PUPRPKP juga melibatkan

masyarakat. Dengan komunikasi yang terjalin keterlibatan instansi lain dalam memelihara dan menjaga Kota Malang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari Implementasi tersebut *Kedua*, Sumberdaya, Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan adanya dukungan dari Sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. 1) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam sumber daya manusia Dinas PUPRPKP dalam menjalankan implemtasi kebijakan belum bisa di katakan berhasil karena faktor kekurangan SDM di satgas pemeliharaan saluran drainase karena satga untuk tahun 2021 hanya berjumlah 12 satgas dan untuk masalah saluran drainase yang tersumbat sampah yang mengakibatkan banjir di tahun 2021 berjumlah 26 titik. 2) Sumber Daya Keuangan, Sumber Daya Keuangan atau bisa disebut anggaran adalah salah hal yang dibutuhkan dalam sarana dan perasana dalam peningkatan, pemeliharaan, pembangunan saluran drainase melalui APBD.dalam hal ini dinas PUPRPKP Kota Malang melalui Musrenbang sudah dinyatakan cukup dengan nominal 11 Miliar Rupiah hingga 12 Miliar Rupiah pertahunnya. *Ketiga*, Disposisi Disposisi atau sikap implementor yaitu kecenderungan pelaksana dalam menunjuk pada sikap karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Dalam proses implementasi karakter pelaksana sangat mendukung berjalannya implementasi seperti komitmen, demokratis, dan kejujuran.

Hal ini dapat diukur melalui seberapa konsisten implementor melaksanakan kegiatan dengan petunjuk yang diberikan dan intensitas pelaksana melakukan komunikasi dengan kelompok (Masyarakat). Dinas Pekerjaan PUPRPKP Kota Malang dalam melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan mereka konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan rutin yang mereka kerjakan untuk terus memantau perkembangan pada saluran drainase dan tetap menjaga fungsi drainase dengan baik. Adapun tingkat pengaduan untuk Dinas PUPRPKP kota Malang yang diukur melalui pelaporan masyarakat terkait titik-titik salah satunya melalui sambat online, meskipun dalam faktor kejujuran Dinas PUPRPKP belum mengoptimalkan hal tersebut ke masyarakat Kota Malang *Keempat*, struktur organisasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di internal birokrasi. Karakteristik yang sesuai akan memengaruhi efektivitas suatu kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan. Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam melaksanakan program penanggulangan banjir dan genangan karena saluran drainase dilaksanakan oleh Bidang tata kelola air dan drainase perkotaan serta UPT.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait Stuktur Birokrasi yaitu Sekretaris Dinas PUPRPKP Kota

Malang, Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan, Unit Pelaksana Teknis memiliki sifat yang terbuka dan transparan. Dengan demikian Dinas PUPRPKP Kota Malang melakukan kerjasama dengan struktur organisasi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan Genangan yang ada. Oleh karena itu Dinas PUPRPKP Kota Malang berpartisipasi dalam bentuk penelitian untuk menentukan lokasi-lokasi yang rawan terhadap banjir dan genangan air yang bekerjasama dengan Kecamatan.

Ada 2 (dua) dalam faktor penghambat eksternal yang *pertama*, Sampah dalam hal ini, sampah masih dikatakan sebagai faktor utama dalam ada genangan air dan banjir di kota Malang. Faktor penghambat ini adalah faktor yang diakibatkan oleh ulah manusia yang masih saya membuang sampah pada saluran drainase, drainase sendiri tidak dapat berjalan dengan baik karena tertumpuknya sampah yang ada. *Kedua*, faktor tata ruang yang ada saat ini di kota Malang yang mengalami perubahan dan juga titik banjir ada yang daerah tersebut masih sedikit saluran drainasenya membuat dinas PUPRPKP kota Malang melakukan pembangunan, akan tetapi faktor penghambat dalam berjalan implementasi pembangunan drainase yaitu titik yang sudah d tentukan oleh Dinas PUPRPKP kota malang untuk pembangunan drainase terkendala tanah milik masyarakat. Faktor Penghambat Internal dalam menjalankan implemntasi penanggulangan banjir yaitu jumlah satgas pemeliharaan yang hanya berjumlah 12 satgas di tahun 2021, hal ini sangat tidak efektif karena ditahun 2021 ada 26 titik banjir yang ada di kota Malang karena masalah tertumpuknya sampah.

Dan faktor pendukungnya yaitu, *Pertama*, anggaran APBD yang mencapai 11M-12M tidak bisa dipungkiri anggaran atau pembiayaan sangat penting dalam menjalankan segala ketentuan yang sudah ada dengan APBD. *Kedua*, adanya komunikasi yang baik dari setiap intasi, militer dan masyarakat dalm mewujudkan kota malang terhidar dari banjir dan genangan air.

Saran

Saran untuk Dinas PUPRPKP Kota Malang agar dalam menjalankan implementasi kebijaka terkait penanggulangan banjir berjalan denga baik yaitu, tentang Sumber Daya Manusia (SDM) perlu adanya penambahan satgas dalam sistem drainase agar banyak satgas yang bertugas makin cepat masalah drainase yang mengakibatkan banjir dan genangan air. Kemudian adanya kebijakan baru yang dibuat oleh Pemkot Malang agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terutama pada saluran drainase yang membuat saluran tersebut tidak berjalan dengan baik. agar berjalan dengan baik. Karena dengan keberhasilan Dinas PUPRPKP Kota Malang dam

menjalankan Implementasi kebijakan tersebut membuat Kota Malang menjadi Kota yang nyaman dan tenang saat terjadinya hujan, saat ini kota Malang sangat identik dengan hujan dan genangan air saat datangnya hujan tinggi ataupun hujan rendah.

Daftar Pustaka

- Pemkot Malang Petakan Wilayah dan Titik Banjir tersedia di www.jatimtimes.com
- Waham, Solichin Abdul. 1999. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (Refrensi Ham), 2014. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana